



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 70 Telp/Fax ( 0511 ) 4799050

---

**REVISI KETIGA RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)**



**INSPEKTORAT  
KAB. BARITO KUALA  
TAHUN 2013-2017**

**MARABAHAN, 1 JULI 2017**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu lembaga teknis daerah, menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan selama kurun waktu 5(lima) tahun ke depan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2013-2017 telah rampung disusun pada bulan Juni 2013, namun pada perjalanannya memerlukan perbaikan dan penyesuaian dengan keperluan dan kebutuhan sehingga dilakukan revisi yang ketiga kalinya pada bulan Juli 2017.

Revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan Renstra dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala agar target yang diharapkan dalam Renstra SKPD 2013-2017 dapat terealisasi sesuai harapan.

Dalam revisi Renstra ini memuat beberapa kegiatan yang belum terdapat dalam Renstra sebelumnya serta menyesuaikan sasaran renstra/program/kegiatan dan memperbaiki indikator kinerja yang mana pada tahun sebelumnya masih kurang sempurna/ kurang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini.

Kerja keras tim penyusun dan keterlibatan para stakeholders (pejabat/pegawai, baik Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat P2UPD, Kepala Sub Bagian dan Pelaksana) dalam penyusunan dan pembahasan revisi Renstra ini merupakan bukti yang teramat terang bahwa gerak maju kearah yang lebih baik merupakan cita-cita dan komitmen bersama.

Karena itu, penghargaan yang tinggi pantas diberikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berbagai saran serta ide cemerlang sehingga Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2013-2017 dapat direvisi lagi untuk yang ketiga kalinya pada bulan Juli 2017 agar tampak lebih sempurna. Kritik dan saran betapapun pahitnya merupakan modal penyempurnaan pelaksanaan penyusunan revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala ini.

Akhirnya, kami berharap semoga revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2013-2017 dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan dan penganggaran selama 1(satu) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala ***“Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”*** di Kabupateb Barito Kuala.

Marabahan, 1 Juli 2017.

**INSPEKTUR**

**Drs. JOHAN ARIFIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19581209 199103 1 002.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
 BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II      GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
B. Sumber Daya SKPD .....	11
C. Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	20
 BAB III      ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	22
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	22
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	23
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota .....	24
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan ...	26
E. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	26
 BAB IV      VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, TRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	37
A. Visi dan Misi .....	37
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	39
C. Strategi dan Kebijakan .....	41

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	74
	A. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala .....	74
	B. Program Penataan Peraturan Per Undang-undangan .....	76
	C. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan/Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur .....	62
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	92
BAB VII	PENUTUP.....	106

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Struktur Organisasi .....	8
2. Susunan Kepegawaian .....	11
3. Sarana dan Prasarana .....	13
4. Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Pengawasan Tahunan.	18
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat .....	19
6. Matrik IV.1 Rencana Strategis 2013-2017 SKPD Inspektorat Kab. Barito Kuala .....	50
7. Matrik IV.2 Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2013-2017 SKPD Inspektorat Kab. Barito Kuala .....	54
8. Matrik IV.2.1 Capain Kinerja Program tahun 2013-2017 SKPD Inspektorat Kab. Barito Kuala .....	55
9. Matrik IV.2.2 Capain Kinerja Kegiatan tahun 2013-2017 SKPD Inspektorat Kab. Barito Kuala .....	57
10. Matrik IV.3 Indikator Kinerja Renstra Tahun 2013-2017 Misi I ...	61
11. Matrik IV.3 Indikator Kinerja Program Tahun 2013-2017 Misi I	63
12. Matrik IV.3.2 Indikator Program Program tahun 2013-2017 Misi II .....	66
13. Matrik IV.4 Daftar Indikator Kinerja Kegiatan TA 2013-2017 Misi I .....	68
14. Matrik IV.4 .1 Daftar Indikator Kinerja Kegiatan TA 2013-2017 Misi II .....	72
15. Matrik V.2 Daftar Indikator Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif TA 2013-2017 Misi I .....	79
16. Matrik V.2 Daftar Indikator Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif TA 2013-2017 Misi II .....	83
17. Matrik V.2 Daftar Indikator Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif TA 2013-2017 Penunjang .....	85
18. Matrik VI.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Kab. Barito Kuala 2013- 2017 .....	93

19. Matrik VI.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Inspektorat Kab. Barito	
Kuala .....	96
20. Matrik VI.3 Indikator Kinerja Pejabat Eselon III Inspektorat Kab. Barito	
Kuala .....	98
21. Matrik VI.4 Indikator Kinerja Pejabat Eselon IV Inspektorat Kab. Barito	101
Kuala .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 -2017 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi" yang dijabarkan sebagai berikut :

- Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi rencana



pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek diimplementasikan kedalam kerja pemerintah daerah dalam bentuk rencana kerja tahunan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang\_undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 No.66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4400)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembara Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Percepatan Pemberantasan Korupsi.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tetang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Barito Kuala Thun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Maksud**

Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013-2017 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2005-2025 atau dokumen lain yang dimaksudkan untuk itu dan mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013-2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### **Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 selain sebagai salah satu dokumen perencanaan SKPD, juga sebagai pedoman, strategi, tujuan dan sasaran serta untuk mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah terpilih yang akan dicapai selama tahun 2013-2017, dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaanya selama lima tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra SKPD merupakan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan SKPD selanjutnya.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dengan susunan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB. I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

##### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- A. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasdan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
- E. Penentuan Isu-Isu Startegis

##### **BAB. IV VIS, MISI, TUJUAN , SASARAN , STATEGI DAN KEBIJAKAN**

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD
- C. Strategi dan Kebijakan

**BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN  
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB. VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

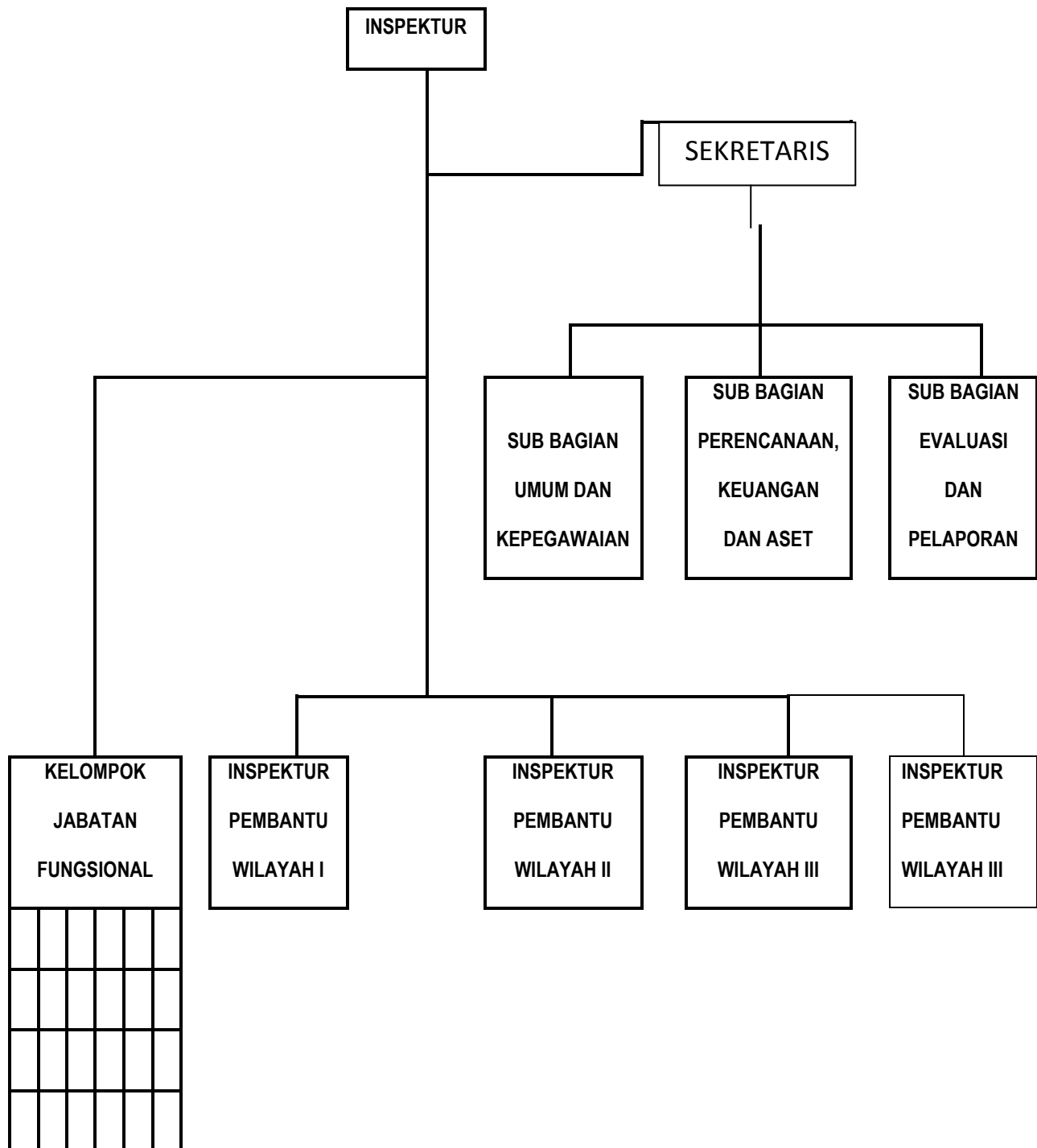
##### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum khususnya perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh urusan bidang pemerintahan di daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud berdasarkan Pasal 5 huruf h Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1.1. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.2. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan;
- 1.3. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pembangunan;
- 1.4. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Kemasyarakatan;
- 1.5. pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya.

2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 sebagai berikut :

Struktur Organisasi





Berdasarkan bagan di atas Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten. Di bidang kesekretariatan Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbag yakni Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan di bidang pengawasan dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah dengan rincian sebagai berikut:

**2.1. Inspektur Pembantu Wilayah I**, dengan wilayah kerja:

1. Kecamatan Kuripan
2. Kecamatan Alalak
3. Kecamatan Mandastana
4. Kecamatan Tabukan
5. Sekretariat DPRD
6. Dinas PU & Penataan Ruang
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Inspektorat
12. Badan Kesbangpolinmas
13. P D A M.

**2.2. Inspektur Pembantu Wilayah II, dengan wilayah kerja:**

1. Kecamatan Tamban
2. Kecamatan Anjir Muara
3. Kecamatan Rantau Badauh
4. Kecamatan Bakumpai
5. Kecamatan Marabahan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perkebunan dan Peternakan
8. Dinas Koperindag
9. Dinas P M D
10. Bappelitbang
11. RSUD H. Adlul Aziz Marabahan
12. PD Aneka Usaha Selidah

**2.3. Inspektur Pembantu Wilayah III, dengan wilayah kerja:**

1. Kecamatan Tabunganen
2. Kecamatan Anjir Pasar
3. Kecamatan Barambai
4. Kecamatan Belawang
5. B P K A D
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

- 8.Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata
- 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10.Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A
- 11.Satpol PP
- 12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13.PD BPR.

2.4. **Inspektur Pembantu Wilayah IV**, dengan wilayah kerja:

- 1.Kecamatan Mekarsari
- 2.Kecamatan Jejangkit
- 3.Kecamatan Wanaraya
- 4.Kecamatan Cerbon
- 5.Sekretariat Daerah
- 6.Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah
7. Dinas Kominfo
8. Dinas Sosial
9. Dinas LH
10. Dinas Pertanian TPH
11. Badan Kepegawaian & Pelatihan
12. Dinas Dukcapil
13. PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.

## B. SUMBER DAYA SKPD

### 1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

No	Jab. Struktural/ Jab. Fungsional	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pendidikan Terakhir	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1	Inspektur	1	Pembina Utama Muda/ IVc	1	S.1	1
2	Sekretaris	1	Pembina Tk.I/ IVb	1	S.1	1
3	Irban I	1	Pembina Tk.I/ IVb	1	S.1	1
	Irban II	1	Pembina Tk. I/ IVb	1	S.1	1
	Irban III	1	Pembina Tk. I/ IVb	1	S.1	1
	Irban IV	1	Pembina Tk. I/IV/b	1	S.1	1
4	Kepala Sub Bagian Program & Keu	1	Penata /IIIc	1	S.1	1
	Kepala sub Bagian Evaluasi &Pelaporan	1	-	-	-	-
	Kepala Sub Bagian Umum & Kepeg	1	Penata /IIIc	1	SLTA	1
5	JF.Auditor	10	PembinaUtama Muda/ IVc	1	S.1	1
			Pembina Tk. I/ IVb	1	S.1	1
			Penata/IIIc	3	S.1	3
			Penata /IIIc	1	S.2	1
			Penata Muda TK.I/III.b	4	S.1	4
			Penata Muda/Ila	1	S.1	1

6	Calon Auditor	2	Penata Muda/III.a	2	S.1	2
7	JF.P2UPD	8	Pembina TK.I/IV.b	1	S.1	1
			Pembina/IV.a	3	S.1	3
			Penata TK.I/III.d	2	S.1	2
			Penata/III.c	1	S.1	1
			Penata Muda Tk. I/ III-b	1	S.1	1
8	Staf Pelaksana	7	Penata / IIIc	1	S.1	1
			Pengatur/ Ilc	1	D.3	1
			Pengatur Muda TK.I/IIb	2	SLTA	2
			Juru Tk. I/ Id	1	SLTP	1
			Juru / I.c	1	SLTP	1
						33

\*Sumber data Inspektorat Kab. Batola Juli 2017.

Dari data tersebut diatas, terdapat Jabatan yang kosong akibat adanya pejabat struktural yang pensiun..

2. Sarana dan prasarana (Barang Milik Daerah /BMD) yang dikuasai Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sampai Per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Station wagon DA 22M	Unit	1	141.463.000,-
2.	Mini bus DA 49 M	Unit	1	115.020.000,-
3.	Sepeda motor	Unit	15	174.770.000,-
4.	Alat Ukur Lainnya (Laser Distance )	Unit	3	6.566..868,-

5.	Mesin ketik manual	Unit	4	5.830.000,-
6.	Mesin absen sidik jari	Unit	1	9.982.500,-
7.	Lemari besi	Unit	1	1.974.580,-
8.	Filling besi/metal	Unit	11	19.476.573,04
9.	Peti uang	Unit	1	7.180.000,-
10.	Papan nama instansi	Unit	1	175.000,-
11.	Meja kayu /meja TV	Unit	1	450.000,-
12.	Meja rapat	Unit	20	10.000.000,-
13.	Kursi rapat	Unit	50	10.000.000,-
14.	Kursi tamu	Set	9	12.282.000,-
15	Meja komputer	Unit	8	3.400.000,-
16.	Sofa	Set	2	2.700.000,-
17.	AC sentral/AC unit	Unit	3	10.500.000,-
18.	Ac Unit	Unit	4	15.370.000,-
19.	AC Unit	Unit	3	14.734.291,-
20.	Kipas angin	Unit	8	1.440.000,-
21.	Televisi	Unit	2	1.400.000,-
22.	Power supply	Unit	6	3.821.000,-
23.	Lambang garuda pancasila	Unit	1	10.000,-
24.	Gambar presiden dan wakil	Unit	1	14.000,-
25.	Dispenser	Unit	1	143.000,-
26.	Handy cam	Unit	1	12.480.000,-
27.	Alat rumah tangga lain-lain	Unit	3	29.367.000,-
28.	P.C Unit	Unit	14	77.995.179,38

29.	Lap Top	Unit	6	56.127.334,73
30.	Note Book	Unit	13	129.796.425,78
31.	Peralatan komputer mainframe lain-lain	Unit	1	1.242.500,-
32..	Printer	Unit	16	29.289.303,88
33.	Peralatan jaringan lain-lain	Jaringan	2	6.500.000,-
34.	Meja kerja eselon II	Unit	3	9.234.401,52
35.	Meja kerja eselon III	Unit	5	3.590.000,-
36	Meja kerja eselon IV	Unit	6	3.237.000,-
37.	Meja kerja pegawai non struktural	Unit	24	8.134.000,-
38.	Meja tamu ruangan biasa	Unit	1	4.500.000,-
39.	Kursi kerja eselon II	Unit	4	7.666.455,03
40.	Kursi kerja eselon III	Unit	10	5.547.000,-
41.	Kursi kerja eselon IV	Unit	17	7.187.000,-
42.	Kursi kerja pegawai non struktural	Unit	25	6.052.000,-
43.	Lemari arsip utk arsip dinamis	Unit	16	12.267.000,-
44.	Camera+ attachment	Unit	2	5.300.000,-
45.	Proyektor + attachment	Unit	1	9.000.000,-
46.	Camera Film	Unit	1	1.430.000,-
47.	Faximile	Unit	1	638.000,-
48.	Alat komunikasi radio HF/FM lain-lain	Unit	1	750.000,-
49.	Antena VHF/FM stationary	Unit	1	1.734.550,-
50.	Switcher manual	Unit	1	7.450.000,-
51.	Audio prosessor	Unit	1	15.500.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>1.020.727.454,02</b>

\*Sumber data Inspektorat Kab. Batola 2014

### **C. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Dalam pelaksanaan sistem/prosedur kerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terdiri atas :

#### **1. Sistem dan Prosedur Penatausahaan**

Dilakukan Sistem surat menyurat sesuai dengan uraian tugas masing-masing yang terdapat pada tugas pokok dan fungsi sekretariat dan bidang sesuai bidang .

#### **2. Sistem dan Prosedur Pemeriksaan.**

- Dilakukan pemeriksaan Reguler ,Reviu Laporan Keuangan, Manajemen aset, Manajemen Kas, dan pemeriksaan fisik.
- Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat atas perintah Kepala Daerah terhadap sesuatu aduan.

#### **3. Pengolahan data tindak lanjut hasil Pemeriksaan.**

Pengolahan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh Sekretariat Cq Subbag. Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaan monitoring /pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI maupun APIP yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang telah diperiksa atau dengan menyelenggarakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

##### **1.1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan pada Periode Sebelumnya**

Selama periode 2010-2014 ketersediaan sarana dan prasarana belum ditingkatkan secara proporsional untuk menghasilkan audit yang bermutu. Hal tersebut belum dilakukan terhadap penyediaan sarana dan prasarana alat bantu audit guna mendukung terwujudnya efektivitas dan profesionalitas kerja.

Secara umum, jumlah anggaran yang tersedia masih belum proporsional dengan jumlah beban pengawasan (jumlah auditi yang harus diaudit maupun pemenuhan



sarana dan prasarana). Dengan anggaran yang tersedia, sejauh ini Inspektorat Kabupaten Barito Kuala baru dapat melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat berkala pada SKPD dan diluar SKPD, sementara pengawasan berkala terhadap semua SKPD dalam tiap tahun, bisa saja tidak terlaksana dengan berbagai keterbatasan baik akibat regulasi, anggaran maupun waktu pemeriksaan yang tersedia.

Kenyataan tersebut sangat tidak efektif bila dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas publik kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memiliki 47 SKPD sebagai auditi maupun auditi diluar SKPD seperti Desa-desa (Dana ADD), Puskesmas dan Sekolah (Dana BOS) dibandingkan dengan jumlah auditor sebanyak 10 orang dan sejak bulan April menjadi 12 orang karena masuknya Calon PNS Formasi Auditor, serta P2UPD sebanyak 8 orang (data tahun 2015). Oleh sebab itu, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menerapkan sistem skala prioritas berdasarkan program strategis dari Jakwas Kemendagri, jumlah anggaran, pendekatan risiko, dan hari kerja yang tersedia pertahun dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Peran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sangat strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan segala keterbatasan yang masih terus dirasakan hingga sekarang, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sejauh ini telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Jangkauan Pengawasan Inspektorat kabupaten Barito Kuala tahun 2010 s.d. 2014 dari perspektif rencana dan realisasi disajikan pada **Tabel 1.1**.

TABEL 1.1.																
PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI KINERJA PENGAWASAN TAHUNAN																
TAHUN 2010 s.d . 2014																
No.	Sasaran /OBRIK	Perbandingan Rencana dengan Realisasi PKPT														
		2010			2011			2012			2013			2014		
		Ren cana	Real sasi	%	Ren cana	Real sasi	%	Ren cana	Real sasi	%	Renc ana	Real sasi	%	Ren cana	Real sasi	%
1	SKPD (reguler)	8	8	100	26	25	96.15	25	25	100	31	31	100	19	19	100
2	Reviu LK semester	-	-	0	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
3	Reviu LK akhir tahun	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
4	Manajemen Aset	-	-	0	90	90	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
5	Manajemen Kas	-	-	0	90	90	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
6	Puskesmas	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
7	Dana BOS	30	30	100	45	45	100	-	-	0	0	0	0	0	0	0
8	Dana ADD	191	191	100	52	52	100	28	28	100	6	6	100	24	24	100
9	Evaluasi AKIP	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	15	15	100
Jumlah		274	274	100	393	392	99.75	233	233	100	217	217	100	238	238	100

## 1.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pada umumnya masyarakat telah memahami peran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selama ini Inspektorat Kabupaten Barito Kuala selalu berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah.

Fakta berikut membuktikan itu, dari tahun 2010 sampai tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala telah menerima sebanyak 12 pengaduan masyarakat, baik yang masuk melalui surat pengaduan dan perintah pemeriksaan dari atasan sesuai urgensinya untuk ditindak lanjuti sebagai pemeriksaan kasus.

Jumlah pengaduan masyarakat tersebut telah ditindak lanjuti sebanyak 12 kasus atau selesai 100 %. Untuk lebih detailnya Inspektorat Kabupaten Barito Kuala telah melakukan pemeriksaan kasus dari tahun 2010 s.d tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.2.								
Penanganan Pengaduan Masyarakat								
Tahun 2010 s.d Tahun 2014								
No.	Asal aduan dan lokasi kejadian	Penanganan pengaduan/ kasus					Jumlah Dumas	Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kecamatan Kuripan							
2	Kecamatan Tabukan							
3	Kecamatan Bakumpai							
4	Kecamatan Marabahan	1	1	2	2	1	7	
5	Kecamatan Cerbon							
6	Kecamatan Rantau Badauh			1			1	
7	Kecamatan Barambai	1					1	
8	Kecamatan Wanaraya							
9	Kecamatan Belawang							
10	Kecamatan Mandastana							
11	Kecamatan Jejangkit							
12	Kecamatan Alalak							
13	Kecamatan Anjir Muara		1				1	
14	Kecamatan Anjir Pasar							
15	Kecamatan Mekarsari							
16	Kecamatan Tamban							
17	Kecamatan Tabunganen							
18	Banjarmasin		2				2	
	JUMLAH						12	
	PROSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan yang terjadwal dalam DPA Inspektorat Kabupaten barito Kuala yakni kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah yang harus disiapkan, baik secara kegiatan maupun secara anggaran, meskipun tidak bisa diprediksi jumlah kejadian kasus pengaduan yang akan ditangani secara pasti jumlahnya, sehingga apabila ada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun aparat bisa tertangani dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

#### **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Dari beberapa tantangan dari luar yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan di daerah, dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat yang harus diantisipasi.

Beberapa hal tantangan yang dihadapi tersebut antara lain :

- a. Auditan masih merasa terjadinya Tumpang tindih pengawasan baik antar APIP maupun BPK
- b. Masih adanya pandangan SKPD yang tidak menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- c. Regenerasi auditor dan P2UPD belum optimal.
- d. Rekrutmen calon auditor dan P2UPD belum mempertimbangkan kebutuhan tupoksi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
- e. Auditan belum sepenuhnya mengetahui peran APIP dalam hal pengawasan baik sebagai quality assurance, katalis maupun konsultan.

Namun dari tantangan tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala juga memiliki peluang yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan memanfaatkan beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut :

- a. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai, auditor dan P2UPD Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- b. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN
- c. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait
- d. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan

- e. Peningkatan dukungan auditan terhadap peran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebagai katalisator dan konsultan.
- f. BPK-RI memberikan penilaian /opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau tidak memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) atas kinerja Kabupaten Barito Kuala.
- g. Menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian TLHP BPK-RI dan BPKP.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan berdasarkan SOTK baru yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Barito Kuala nomor 17 tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Dalam SOTK Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terdapat Jabatan fungsional yang belum proporsional dari segi kuantitas maupun kualitas baik jabatan fungsional auditor maupun jabatan fungsional P2UPD, untuk itu masa yang akan datang diperlukan diklat-diklat jabatan fungsional dan formasi yang diinginkan dan dipenuhi pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang berpengaruh pada tupoksi.

##### **1. Sumber Daya Manusia**

- 1.1. Jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD secara bertahap sesuai dengan kebutuhan beban kerja pengawasan sehingga proporsional dengan jumlah obrik pemeriksaan (obrik).
- 1.2. Kapasitas pegawai Inspektorat meningkat sesuai dengan perkembangan bidang tugas dan kinerja yang semakin tinggi sehingga dapat dihasilkan output yang baik.

1.3. Profesionalisme pejabat fungsional auditor dan P2UPD meningkat secara bertahap melalui pengembangan profesi berupa diklat fungsional, diklat teknis, workshop, seminar, studi banding, dsb.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung.

2.1. Prasarana (gedung) belum mencukupi:

- a). Luas ruangan kerja belum memenuhi standar;
- b). Ruang pendukung kerja seperti gudang perlengkapan, gudang arsip, ruang data perencanaan, ruang pembinaan SDM, ruang perpustakaan belum tersedia.

2.2. Alat bantu audit dan alat pengolahan data masih kurang.

**B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH**

Tinjauan Visi dan Program Kepala Daerah Terpilih

**Visi : "BARITO KUALA SAMA RASA " BARITO KUALA, SATU KATA UNTUK MAJU,  
MANDIRI MEWUJUDKAN RAKYAT BERDAYA SAING YANG SEJAHTERA.**

**Misi : SAMARASA**

- a. **SA** : Satu Sinergisitas Usaha Berdaya Saing Yang Ditumbuhkembangkan Melalui Peningkatan Aktifitas Perekonomian Berbasis Pertanian Inovatif.
- b. **MA** : Masyarakat Cerdas, Sehat Dan Bertaqwa Yang Diwujudkan Dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. **RA** : Rasa Aman Dan Adil Yang Dipenuhi Dengan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Dan Penciptaan Tata Kehidupan Sosial Yang Baik.
- d. **SA** : Sarana Dan Prasarana Wilayah Yang Ditingkatkan Melalui Perbaikan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunannya.

**Dari misi 3. “RA”** Rasa aman dan adil, yang dipenuhi dengan penyelenggaraan tata pemerintahan dan penciptaan tata kehidupan sosial yang baik”. Dengan tujuan yang ingin dicapai “Mewujudkan tata pemerintahan dan menciptakan tata kehidupan social yang baik”. Dengan sasaran ““Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil”.

Untuk mendukung terlaksananya dari misi .3. “RA” tersebut, Inspektorat dengan tupoksinya sebagai pelaksana bidang pengawasan dalam membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mengemban misi tersebut, Inspektorat menetapkan beberapa program dan kegiatan prioritas untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran misi tersebut.

### **C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROV/KAB/KOTA**

**Tinjauan Renstra Itjen Kemdagri.**

**Visi: “Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang baik dan terpercaya dalam wadah NKRI”.**

**Misi :**

1. Menciptakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari KKN.
4. Menilai penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan balik terhadap kebijakan perencanaaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.



5. Menyebarluaskan pengertian arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menuju terwujudnya budaya pengawasan.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Itjen Kemendagri menetapkan Program Kerja sebagai berikut :

- Penataan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .
- Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman , standar dan petunuu teknis pengawasan.
- Peningkatan pembinaan Aparatur Pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.
- Peningkatan fasilitas terhadap Badan Pengawas Daerah.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terus berkoordinasi dengan Itjen Kemendagri.

### **Tinjauan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan**

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Visi : “Menjadi Pengawas Yang Profesional Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Provinsi Kalimantan Selatan” dengan Misi sebagai berikut :

- 1 Memantapkan Sumber Daya Pengawasan;
- 2 Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3 Mendorong Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik Dan Bersih.

Inspektorat sebagai institusi Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan rutin keseluruh sektor sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dijelaskan bahwa :

- Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### **D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN**

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan karena pelaksanaan tugas pada inpektorat tidak dipengaruhi oleh kedua hal **tersebut**.

#### **E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

### **Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisa lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya analisis lingkungan eksternal maupun internal

Tuntutan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui fungsi pengawasan adalah mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku serta memastikan bahwa SKPD mampu menghasilkan kinerja yang unggul dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan peran tersebut Inspektorat Kabupaten Barito Kuala perlu memahami isu strategis yang sedang terjadi terutama arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala 2013-2017. Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Periode 2013--2017, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan yang isinya antara lain bahwa fokus prioritas pembangunan aparatur lima tahun ke depan adalah melanjutkan agenda perwujudan *good governance*, reformasi birokrasi, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan fokus prioritas di atas, ada beberapa isu strategis pengawasan terhadap kinerja di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, di antaranya:

## **1. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan upaya mengubah praktik-praktik birokrasi yang tidak efektif menuju praktik-praktik administrasi pemerintah yang efektif. Visi reformasi birokrasi adalah mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membangun, menata-ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintah agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan sebagai perwujudan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 62 tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013-2017.

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2013-2017 adalah bentuk operasi analisis Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. RMRB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Pada pelaksanaan reformasi birokrasi 2013-2017 ada beberapa

program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan dibawah ini:

### **1.1. Program Manajemen Perubahan**

Program ini untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Dengan target yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi;
- b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- c. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

### **1.2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Program ini untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Dengan target yang ingin dicapai :

- a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten;
- b. meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

### **1.3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi**

Program ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi pemerintah kabupaten secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas

masing- masing, sehingga organisasi pemerintah kabupaten menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).dengan target yang ingin dicapai :

- a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal;
- b. meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### **1.4. Program Penataan Tatalaksana**

Program ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada pemerintah daerah.dengan target yang ingin dicapai :

- a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
- b. meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan;
- c. meningkatkan kinerja.

#### **1.5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Program ini untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada pemerintah kabupaten yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh jaminan kesejahteraan yang sepadan. Dengan target yang ingin dicapai :

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- d. menurunnya efektifitas manajemen SDM aparatur;
- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.

### **1.6. Program Penguatan Pengawasan**

Program ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dengan target yang ingin dicapai

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan keuangan negara;
- b. meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara / SPI;
- c. meningkatnya status opini BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan negara;
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan keuangan Negara/Daerah.

### **1.7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Program ini untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten. Dengan target yang ingin dicapai :

- a. meningkatnya kinerja;
- b. meningkatnya akuntabilitas.

### **1.8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Program ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kebutuhan dan harapan masyarakat.dengan target yang ingin dicapai :

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Terwujudnya Sistem Pelayanan Minimal (SPM).

### **1.9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Program ini untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map. Dengan target yang ingin dicapai untuk memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

Untuk Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala 2013-2017 memerlukan komitmen dan menjadi tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah kabupaten Barito Kuala.

### **2. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**

Dalam rangka pemberantasan korupsi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun sampai tahun 2004 upaya pemberantasan KKN dianggap belum efektif. Pada tahun 2004 Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di posisi 137 dari 146 negara yang disurvei dengan IPK hanya 2,0.

Menyikapi kondisi tersebut, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Hasilnya pada tahun 2011—meski belum terlalu signifikan—IPK Indonesia naik menjadi 2,8 dan diharapkan pada tahun 2014 IPK Indonesia naik menjadi 5,0

Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mendukung upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, antara lain dengan



melaksanakan **Pakta Integritas** dan **Penetapan Satuan Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi**.

**a . Pelaksanaan Pakta Integritas**

Pakta Integritas merupakan pernyataan/janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* pada lingkup pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Unsur-unsur strategis Pakta Integritas sebagai berikut:

- 1) Piagam Pakta Integritas adalah pernyataan/janji kejujuran yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
  - 2) Modul Pakta Integritas adalah kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas secara benar dan efektif.
  - 3) Pakta Integritas Pelaksanaan Anggaran Tahunan adalah pernyataan dan kesanggupan melaksanakan anggaran tahun berjalan secara taat asas dan akuntabel dengan segala konsekuensinya apabila melakukan pelanggaran.
- Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Mencegah terjadinya penyimpangan yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi oleh para pimpinan, pejabat dan pegawai di berbagai bidang.
- b) Meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menjadi instansi pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- c) Mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas, efektif dan efisien.

Secara umum, Pakta Integritas di lingkungan Kabupaten Barito Kuala berisi komitmen sebagai berikut :

- 1) Berperan serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas
- 5) Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah dan sesama pegawai dilingkungan kerja secara konsisten;
- 6) Menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan SKPD yang di pimpin serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7) Melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan unit kerja yang di pimpin dengan memadai;
- 8) Menerapkan disiplin pegawai negeri secara sungguh-sungguh dan konsekuen dilingkungan unit kerja yang di pimpin sesuai peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Memastikan seluruh pegawai dilingkungan unit kerja yang di pimpin melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya sesuai hak kewenangannya sehingga SKPD dan setiap pegawai dilingkungan unit kerja yang di pimpin memiliki kinerja yang baik;
- 10) Memberikan pelayanan dan fasilitas sesuai standar dan prinsip-prinsip prima tanpa diskriminasi;
- 11) Bila melanggar hal-hal tersebut diatas, siap menghadapi konsekuensinya

**b. Penetapan Satuan Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi.**

Dengan ditetapkannya **Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 303 /KUM/2012** tanggal 5 Nopember 2012 tentang **Penetapan Satuan Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi**, adalah sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi pada Pemerintah Kabupaten barito Kuala, meliputi :

1. Sekretariat Daerah.
2. Inspektorat.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

**Isu Daerah**

- Inovasi kegiatan pertanian mutlak dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengkombinasikan penerapan teknologi, manajemen pascapanen dan manajemen pemasaran serta mengembangkan diversifikasi produk akhir.
- Peningkatan produktivitas Kabupaten Barito Kuala menjadi hal yang mutlak dalam rangka peningkatan pendapatan petani hal ini didukung besarnya produksi padi yang tinggi harus dikombinasikan dengan inovasi teknologi, manajemen pascapanen, dan pemasaran yang baik.
- Barito Kuala masuk dalam kawasan startegis dalam pengembangan kota metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut).

- Besarnya potensi perkebunan di kabupaten Barito Kuala harus diselaraskan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan pertanian.
- Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di setiap desa sebagai bagian dalam upaya mempertahankan kawasan lestari sumberdaya alam.
- Deforestasi sumberdaya hutan khususnya galam yang disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi dan kebakaran hutan di Kabupaten Barito Kuala tidak diimbangi dengan upaya reboisasi dan rehabilitasi yang memadai.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. VISI DAN MISI

##### VISI INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA.

Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diatas mendudukan masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagai subyek pembangunan dengan satu kebulatan tekad pemimpin dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala untuk maju , mandiri dan berdaya saing dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang dijalankan secara profesional, akuntabel dan transparansi yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2013-2017, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik.”***

**Penjelasan makna :**

**Pengawasan internal berkualitas dan profesional memiliki arti bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala memiliki mutu dan kompetensi dibidang pengawasan**

**Menuju tata kelola pemerintahan yang baik memiliki arti bahwa Inspektorat Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa seluruh satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat**

mewujudkan hasil kinerja yang Optimal sesuai tugas dan fungsinya (quality assurance). Pencapaian hasil kinerja yang optimal tersebut adalah salah satu wujud dari akuntabilitas publik.

Berdasarkan penjelasan mengenai visi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, Insektorat Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui pengawasan fungsional agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk pelayanan di masing-masing bidang urusan.

### ***Misi***

#### **Pernyataan Misi**

Misi ke 3 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu “Rasa Aman Dan Adil Yang Dipenuhi Dengan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Dan Penciptaan Tata Kehidupan Sosial Yang Baik”.

Pernyataan Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan perwujudan penyelenggaraan tata pemerintahan dan menciptakan tata kehidupan sosial yang baik dengan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mendukung kepuasan, rasa aman dan adil.

Dari pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun ke depan, berkaitan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupate Barito Kuala memiliki Misi sebagai berikut:

***Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menetapkan Misi :***

- 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal.***
- 2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah.***

## **B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

### **1. Tujuan**

Tujuan strategis merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Dengan memformulasikan tujuan, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika global.

Perumusan tujuan strategis juga akan mengarahkan Inspektorat dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari Misi **Pertama** adalah :” ***Mewujudkan pemerintahan yang semakin baik***”.
2. Tujuan dari Misi **Kedua** adalah : “***Mewujudkan Aparat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang Profesional***”

## 2. SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

Untuk mencapai Pernyataan dari misi yang telah ditetapkan tersebut perlu ditetapkan Sasaran Strategis.

Pencapaian Pernyataan Misi I “***Meningkatkan efektivitas pengawasan internal.***”.

Guna mewujudkan pernyataan Misi I “***Meningkatkan efektivitas pengawasan internal***” Inspektur Kabupaten Barito Kuala menetapkan tujuan yang akan dicapai “***Mewujudkan pemerintahan yang semakin baik***” dengan Sasaran Strategis :

2.1. “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala”

dengan indikator :

a. “Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala”.

b. “Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala”

2.2. “Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat” dengan indikator “Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat”

Untuk mendukung dapat tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala” tersebut perlu ditunjang dengan Sasaran Program, yaitu :

2.1.1. “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala” dengan indikator “Prosentase Jumlah SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal CC”

2.1.2. “Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan” dengan indikator : “Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material”.

2.1.3. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala” dengan indikator “Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti”.



2.1.4. “Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD” dengan indikator “Prosentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP”.

2.1.5. “Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat” dengan indikator “Prosentase Terpenuhi Penugasan Tim Kasus Pengaduan Masyarakat”:

2.1.6 : “Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal”  
dengan indikator :

- a. “Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti”
- b. “Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti”

Pencapaian Misi II **“Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah”**  
dengan tujuan yang ingin dicapai **“Mewujudkan Aparat Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang Profesional”** dengan Sasaran Program “Meningkatnya Aparat yang Kompeten” dengan indikator :

- a. “Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif”.
- b. “Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang Lulus Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional”

## C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### Kebijakan dan Strategi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta bersinergi dengan arah kebijakan dan strategi Kabupaten Barito Kuala, maka Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Misi I “***Meningkatkan efektivitas pengawasan internal***” Inspektur Kabupaten Barito Kuala menetapkan tujuan yang akan dicapai “***Mewujudkan pemerintahan yang semakin baik***” dengan Sasaran Strategis :

1. Sasaran “***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala***,” dengan Indikator :

1.1. “***Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala***”.

1.2. “***Opini BPK R atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala***”

1.1.1. Indikator Kinerja “***Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Yang***”

adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, karena merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013-2017.

Untuk mencapai sasaran dan Indikator “***Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala***” yang telah ditargetkan dilakukan dengan Strategi “***Memastikan dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Baik***” dengan kebijakan yang dilakukan Peningkatan Kualitas SAKIP melalui Reviu LKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Keberhasilan indikator “***Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala***” sangat tergantung pada Sasaran Program “***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala”***” dengan indikator “***Prosentase Jumlah SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal CC***”.

Untuk mencapai sasaran Program “***Prosentase Jumlah SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal CC***”. dilakukan dengan strategi “***Memastikan dokumen Perencanaan SKPD baik***” dengan

kebijakan yang dilakukan “Peningkatan Kualitas AKIP SKPD melalui Pembinaan dan Evaluasi LKIP SKPD”.

Untuk merealisasikan indikator kinerja “Prosentase Jumlah SKPD Nilai SAKIP Minimal CC” dituangkan dalam Program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan Kegiatan “Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala” dengan Sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Reviu RKA SKPD
- b. Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola
- c. Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD.

Dengan indikator Kegiatan :

- a. Jumlah LHR RKA SKPD Sesuai standard dan tepat waktu.
- b. Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Standard dan tepat waktu.
- c. Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standard an tepat waktu

1.2.1. Indikator *“Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala”* juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, karena merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemertintah Kabupaten Barito Kuala 2013-2017.

Untuk mencapai sasaran dan Indikator *“Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala”* yang telah ditargetkan dilakukan dengan strategi “Melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten” dengan kebijakan yang dilakukan “Pemantapan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten oleh Inspekpotorat Kabupaten Barito Kuala”.

Dan untuk mewujudkan terpenuhinya indikator kinerja “Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala” yang telah ditargetkan juga dituangkan dalam Program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”

Keberhasilan indikator kinerja “Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala” sangat tergantung dengan Sasaran Program:

1.2.1.1. “Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan”

dengan indikator :

“Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material”.

Untuk mencapai Sasaran Program “Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan” tersebut dilakukan dengan strategi strategi “Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan” dengan Kebijakan yang dilakukan “Penyusunan dan Penyempurnaan Norma, Standard dan Prosedur Pemeriksaan”.

Yang dituangkan dalam Program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan dengan Kegiatan “Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala” dengan Sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Audit Operasional
- b. Melakukan Audit Manajemen Aset
- c. Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran
- d. Melakukan Probit Audit

Dengan indikator Kinerja :

- a. Jumlah LHA Operasional Sesuai standar dan tepat waktu
- b. Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standard an tepat waktu

- c. Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai standard an tepat waktu
- d. Jumlah Laporan Probit Audit sesuai standard an tepat waktu.

1.2.1.2. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala”

dengan indikator “Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti”.

Untuk mencapai sasaran dan indikator Program tersebut dilakukan dengan Strategi “Melakukan Reviu LK SKPD” dengan Kebijakan “Pemantapan Reviu Laporan Keuangan SKPD”.

Selanjutnya dituangkan dalam Program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” pada Kegiatan “Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala” dengan Sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola
- b. Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD

Dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai standar dan tepat waktu
- b. Jumlah LHR LK SKPD sesuai standar dan tepat waktu.

1.2.1.3. “Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD” dengan indikator “Prosentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP”.

Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut dilakukan dengan Strategi “Melakukan Sosialisasi SPIP” dengan Kebijakan yang dilakukan “Pembentukan Satgas SPIP di SKPD” yang dituangkan dalam Program “Penataan Peraturan Per

Undang-undangan” pada Kegiatan “Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan”, dengan sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
- b. Melakukan Pembentukan Satgas SPIP SKPD

Dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi SPIP
- b. Jumlah SKPD yang terbentuk Satgas SPIP SKPD

1.2.1.4. “Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal” dengan indikator :

- a. “Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti”
- b. “Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti”

Untuk mencapai sasaran dan indikator “Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti” tersebut dilakukan dengan Strategi “Peningkatan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan” dengan kebijakan yang dilakukan melalui “Intensifikasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP”, yang dituangkan dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” pada “Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan” dengan Sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Melaksanakan Rapat Gelar Pengawasan/Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan APIP.

Dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Jlh LHM Hasil Pemeriksaan APIP sesuai standard dan tepat waktu.
- b. Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang dilaksanakan/diikuti

Dan untuk mencapai indikator “*Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Telah Selesai Ditindak Lanjut*” dilakukan dengan Strategi “Peningkatan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan” dengan kebijakan yang dilakukan melalui “Intensifikasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI”, dituangkan dalam Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” pada Kegiatan “Tindak Lanjut Hasil Temuan” dengan sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- b. Mengikuti Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Jlh LHM TLHP Hasil Pemeriksaan BPK-RI sesuai standard dan tepat waktu.
- b. Jumlah Rapat Rekonsiliasi TLHP BPK RI yang diikuti.

2. Sasaran ***“Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat”*** dengan indikator ***“Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat”***. Indikator ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, karena indikator kinerja ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013-2017.

Guna mencapai sasaran dan indikator tersebut dilakukan dengan strategi ***“Membuka Saluran atas Pengaduan Masyarakat”*** dengan mengambil kebijakan ***“Menindak Lanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat”*** yang selanjutnya dituangkan dalam Program ***“Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”***, dengan Sasaran Program : ***“Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat”*** , dengan indikator ***“Prosentase Terpenuhinya penugasan tim kasus pengaduan masyarakat”***.

Untuk merealisasikan Sasaran Program tersebut dituang pada Kegiatan ***“Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah”*** dengan sasaran Kegiatan :

- a. Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan Rapat Tim Sinergitas Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Prosentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standar dan tepat waktu.
- b. Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindak lanjuti.

Untuk tercapainya Misi I ***“Mewujudkan pemerintahan yang semakin baik”***. dan beberapa sasaran (Sasaran Strategis dan Sasaran Program) tersebut diatas, perlu ditunjang dengan Misi II ***“Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah”***.



Misi “***Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah***” tersebut dapat terealisasi bila didukung dengan aparat pengawas yang kompeten, oleh karena ditetapkan Sasaran yang akan dicapai, yakni “***Meningkatnya Aparat yang Kompeten***”. dengan indikator “

- a. “*Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif*”.
- b. “*Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional*”.

Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut dilakukan dengan Strategi “*Peningkatan Kompetensi APIP*” dengan Kebijakan yang dilakukan mengikut sertakan “*Diklat Sertifikasi JFA dan Diklat Substantif Bidang Pengawasan*”, selanjutnya dituangkan dalam Program “*Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*” dengan Kegiatan “*Pendidikan dan Pelatihan Formal*”, dengan Sasaran Kegiatan :

- a. Mengikutsertakan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan.
- b. Mengikutsertakan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional.

Dengan indikator kinerja kegiatan :

- a. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan
- b. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu ( PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional
- c. Prosentase Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri.

**Matrik IV.1**  
**RENCANA STRATEGIS 2013-2017**  
**SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas Dan Profesional Menunju Tata Kelola Kepemrintahan Yang Baik	1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal	1. Mewujudkan Kepemerintahan yang semakin baik.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	LEVEL	Meningkatnya Akuntabilitas SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Jumlah SKPD nilai minimal CC	(%)	a. Melakukan Review RKA SKPD  b. Melakukan Review LKIP Pemkab. Batola  c. Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD.	a. Jumlah LHR RKA SKPD Sesuai standard dan tepat waktu.  b. Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Standard dan tepat waktu.  c. Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standard an tepat waktu	Dok. LHR  Dok. LHR  Dok. LHR
				Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Opini	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material.	%	a. Melakukan Audit Operasional  b. Melakukan Audit Manajemen Aset.  c. Melakukan Audit	a. Jumlah LHA Operasional Sesuai standar dan tepat waktu  b. Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standard an tepat waktu  c. Jumlah LHA Kas Akhir	Dok. LHA  Dok. LHA  Dok. LHA

									Kas Akhir Tahun Anggaran	Tahun sesuai standard an tepat waktu	Dok. LHA
									d. Melakukan Probit Audit	d. Jumlah Laporan Probit Audit sesuai standard an tepat waktu.	Dok. Lap
						Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti.	%	a. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola b. Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD	a. Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai standar dan tepat waktu b. Jumlah LHR LK SKPD sesuai standar dan tepat waktu.	Dok. LHR Dok. LHR
						Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD	Prosentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP	%	a. Melakukan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP b. Melakukan Pembentukan Satgas SPIP	a. Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi b. Jumlah SKPD yang terbentuk Satgas SPIP	SKPD SKPD

						Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	1. Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindak lanjuti	%	a. Melakukan monitoring terhadap TLHP APIP	a. Jlh LHM TLHP APIP sesuai Standard dan tepat waktu.	Dok. LHM
									b. Melakukan Rapat Pemutakhiran Data/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP	b. Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang dilaksanakan /diikuti	Kegiatan
							2. Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindak lanjuti	%	a. Melakukan monitoring terhadap TLHP BPK	a. Jlh LHM TLHP BPK RI sesuai Standard dan tepat waktu.	Dok. LHM
									b. Mengikuti Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI.	c. Jumlah Rapat Rekonsiliasi TLHP BPK RI yang diikuti.	Kegiatan
			Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat.	(%)	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Terpenuhinya penugasan Tim kasus pengaduan masyarakat	%	a. Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	a. Jumlah Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standar dan tepat waktu.	Dok. LHA

									b. Menyiapkan bahan Rapat Sinergitas Penanganan Dumas	b. Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang Ditindak lanjuti.	%
	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip).	Mewujudkan Aparat Inspektorat Kab. Barito Kuala yang profesional.	-	-	-	Meningkatnya Aparat Yang Kompeten.	a. Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif.	%	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan.	1. Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Org
							b. Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional	%	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional.	2. Prosentase Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri.  Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional	Kegiatan  Org

Matrik IV.2  
**MATRIK TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2013-2017**  
**SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2012)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)				(6)
1. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	1. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	C	CC	B	B	B	B	B
		1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat.	Prosentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Matrik IV.2.1  
**MATRIK TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2013-2017**  
**SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2012)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
						2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)			(3)		(4)	(5)				(6)
1. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Jumlah SKPD nilai minimal CC	0%	0%	20%	30%	40%	50% (dari 46 SKPD)	50% (dari 46 SKPD)
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang undangan.	Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material.	60,87%	70%	75 %	85%	90%	95% (dari 46 SKPD)	95% (dari 46 SKPD Pemeriksaan).
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti.	0%	100%	100%	100%	100%	100% (dari 46 SKPD)	100% (dari 46 SKPD)
			Terbenyuknya SPIP di SKPD	Prosentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP.	0%	0%	0%	32%	64%	100% (dari 46 SKPD)	100% (dari 46 SKPD)
			Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal,	1. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah selesai ditindak lanjuti.	70%	80%	80%	80%	80%	80% (dari jumlah rekomendasi)	80% (dari jumlah rekomendasi)

				2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah selesai ditindaklanjuti	70%	80%	80%	80%	80%	80% (dari jumlah rekomendasi BPK-RI)	80% (dari jumlah rekomendasi BPK-RI)
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Terpenuhinya penugasan Tim kasus pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Aparat Inspektorat Kab. Batola yang profesional.	-	-	Meningkatnya Aparat Yang Kompeten.	1. Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif.	18%	20%	25%	30%	40%	50%	50%
				2. Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan JF	30%	40%	45%	50%	55%	60%	60%



Matrik IV.2.2  
Matrik TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013-2017  
SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
							2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)											
1. Mewujudkan Kepemerintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Persentasi Jumlah SKPD nilai minimal CC	a. Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD Sesuai standard dan tepat waktu.	46 LHR	46 LHR	46 LHR	46 LHR	47 LHR	231 LHR
					b. Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola.	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Standard dan tepat waktu.	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	5 LHR
					c. Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD.	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standard an tepat waktu	0	46 LHR	46 LHR	46 LHR	47 LHR	185 LHR
		Opini BPK	Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang undangan.	Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material.	a. Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional Sesuai standar dan tepat waktu	85 LHA	85 LHA	85 LHA	87 LHA	105 LHA	447 LHA
					b. Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standard an tepat waktu.	0	0	46 LHA	0	47 LHA	93 LHA
					c. Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai standard an tepat waktu	46 LHA	46 LHA	46 LHA	46 LHA	47 LHA	231 LHA

					d. Melakukan Probit Audit	Jumlah Laporan Probit Audit sesuai standard an tepat waktu	0	0	0	0	11 lap	11 Lap
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti.	a. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai standar dan tepat waktu	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	5 LHR
					b. Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD	Jumlah LHR LK SKPD sesuai standar dan tepat waktu.	46 LHR	46 LHR	46 LHR	46 LHR	47 LHR	231 LHR
			Terbentuknya SPIP di SKPD	Prosentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP.	a. Melakukan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi	0	0	15 SKPD	15 SKPD	17 SKPD	47 SKPD
					b. Melakukan Pembentukan Satgas SPIP	Jumlah SKPD yang terbentuk Satgas SPIP	0	0	15 SKPD	15 SKPD	17 SKPD	47 SKPD
			Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal,	1. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah selesai ditindak lanjuti.	a. Melakukan monitoring terhadap TLHP APIP	Jlh LHM APIP sesuai standard an tepat waktu.	18 LHM	18 LHM	16 LHM	20 LHM	20 LHM	92 LHM
					b. Melakukan Rapat Pemutakhiran Data/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang dilaksanakan/diikuti	3 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	15 Kegiatan

				2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah selesai ditindaklanjuti	a. Melakukan monitoring terhadap TLHP BPK	Jlh LHM TLHP BPK RI sesuai standard an tepat waktu	2 LHM	2 LHM	2 LHM	2 LHM	2 LHM	10 LHM
					b. Mengikuti Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI.	Jumlah Rapat Rekonsiliasi TLHP BPK RI yang diikuti.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	10 Kegiatan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Terpenuhinya penugasan Tim kasus pengaduan masyarakat	a. Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat;	Perentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standar dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					b. Menyiapkan bahan Rapat Sinergitas Penanganan Dumas	Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindaklanjuti.	-	-	-	-	100%	100%
Mewujudkan Aparat Inspektorat Kab. Barito Kuala yang profesional.	-	-	Meningkatnya Aparat Yang Kompeten.	1. Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	12 OK	10 OK	9 OK	15 OK	10 OK	56 OK

				yang bersertifikat Diklat Substantif.	Pengawasan.							
						Prosentase Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri.		4 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	4 Keg.	14 Keg.
				2. Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan JF	c. Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional	5 OK	7 OK	8 OK	2 OK	7 OK	29 OK

Matrik IV.3  
Matrik Daftar Indikator Kinerja Renstra.  
Tahun 2013 – 2017.

nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA  
 SI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.  
 ISI 1 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	IK INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2012)	TARGET TAHUN					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				2013	2014	2015	2016	2017				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Pemerintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	2. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten.	C	CC	B	B	B	B	Memastikan dokumen perencanaan baik.	Peningkatan kualitas AKIP melalui reviu LKIP Pemerintah Kabupaten.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan KDH.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
		3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Reviu LK Pemkab	Pemantapan reviu LK Pemkab.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan KDH.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

	Meningkat nya penyelesaian pengadu an masyarakat.	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Membuka saluran atas pengaduan masyarakat	Menindak lanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijaksanaa n KDH.	Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Matrik IV.3.1  
Matrik Daftar Indikator Kinerja Program.  
Tahun 2013 – 2017.

nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA  
SI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.  
ISI 1 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	IK SASARAN	SASARAN PROGRAM	IK SASARAN PROGRAM	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2012)	TARGET TAHUN					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
						2013	2014	2015	2016	2017				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)
1. Mewujudkan Keperintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Jumlah SKPD nilai minimal CC	0%	0%	20%	30%	40%	50% (dari 46 SKPD)	Memastikan dokumen perencanaan SKPD baik.	Peningkatan kualitas AKIP melalui Pembinaan dan evaluasi LKIP SKPD.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
	.	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material	60,87%	70%	75%	85%	90%	95% (dari 46 SKPD)	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan.	1. Penyusunan dan Penyempurnaan norma, standard dan prosedur pemeriksaan.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti.	0%	100%	100%	100%	100%	100% (dari 46 SKPD)	Reviu LK SKPD.	Pemantapan reviu LK SKPD.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakannaa KDH.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
			Terben tunya SPIP di SKPD	Prosentase SKPD yang telah memben tuk Satgas SPIP.	0%	0%	0%	32%	64%	100% (dari 46 SKPD)	Sosialisasi SPIP.	Pembentuka n SPIP di SKPD.	Penataan Peraturan Per Undang-Undangan .	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan
			Meningkatnya Pena nganan Penyelesai an Pengadu an Masyara kat	Prosentase Terpe nuhinya penugas an Tim kasus pengadu an masyara kat	100%	100%	100%	100%	100%	100% (dari jumlah pengadu an yang meme nu hi 5W1H)	Membuka saluran atas pengaduan masyarakat	Menindak lanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.	Peningkat an Sistem Pengawas an Internal dan Pengendal ian Pelaksana an Kebijakannaa KDH.	Penangan an Kasus Pengadua n Dilingkun gan Pemerinta h Daerah.
			Meningkatnya penyele saian tindak lanjut hasil pemeriksa an internal dan ekster nal,	Prosentase rekomenda si hasil pemeriksa an internal yang selesai ditindak lan juti.	70%	80%	80%	80%	80%	80% (dari jlh reko men dasi)	Peningkat an Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.	Intensifikasi pelaksa an monitoring dan evaluasi atas penyelesaia n rekomendasi hasil pemeriksaan	Peningkat an Sistem Pengawas an Internal dan Pengendal ian Pelaksana an	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas an Internal .



												APIP.	Kebijaksanaan KDH.	
				Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	70%	80%	80%	80%	80%	80% (dari jlh rekomendasi BPK-RI)	Peningkatan Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan	Intensifikasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal .

Matrik IV.3.2  
Matrik Daftar Indikator Kinerja Program.  
Tahun 2013 – 2017.

nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA  
SI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.  
ISI 2 : MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	IKU INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA	SASARAN PROGRAM	IK PROGRAM	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2012)	TARGET TAHUN					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
						2013	2014	2015	2016	2017				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Aparat Inspektorat Kab. Barito Kuala yang profesional.			Meningkatnya aparat yang kompeten	Prosentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	10%	20%	25%	30%	40%	50%	Peningkatan Kompetensi APIP.	Mengukuti ser takan Diklat Substantif bidang pengawasan.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan/ Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
				Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat	30%	40%	45%	50%	55%	60%	Peningkatan Kompetensi APIP.	Mengukuti ser takan Diklat Substantif bidang	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal

				rat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenja ngan Jabatan Fungsio nal								pengawas an.	Pengawasan/ Peningkatan Kapasitas Sumberda ya Aparatur	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Matrik IV.4  
Matrik Daftar Indikator Kinerja Kegiatan  
Tahun 2013 – 2017.

nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA  
SI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.  
ISI 1 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	IK SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IK SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IK KEGIATAN	TARGET TAHUN				
									2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Mewujudkan Keperintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya Akuntabilitas SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Jumlah SKPD nilai minimal CC	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD Sesuai standard dan tepat waktu.	-	-	46 LHR	46 LHR	47 LHR
							Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Standard dan tepat waktu.	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
							Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standard an tepat waktu	-	46 LHE	46 LHE	46 LHE	47 LHE

		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Prosentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional Sesuai standar dan tepat waktu	85 LHA	85 LHA	85 LHA	87 LHA	105 LHA
							Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standard an tepat waktu	0	0	46 LHA	46 LHA	47 LHA
							Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai standard an tepat waktu	46 LHA	46 LHA	46 LHA	46 LHA	47 LHA
							Melakukan Probitas Audit	Jumlah Laporan Probitas Audit sesuai standard an tepat waktu.	-	-	-	-	11 Lap
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai standar dan tepat waktu	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
							Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD	Jumlah LHR LK SKPD sesuai standar dan tepat waktu.	46 LHR	46 LHR	46 LHR	46 LHR	47 LHR

			Penataan Peraturan Per Undang-Undangan.	Terben tuk nya SPIP di SKPD	Prosentase SKPD yang telah memben tuk Satgas SPIP.	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan .	Melaku kan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi	-	-	15 SKPD	15 SKPD	17 SKPD
							Melaku kan Pembenuk an Satgas SPIP	Jumlah SKPD yang terbentuk Satgas SPIP	-	-	15 SKPD	15 SKPD	17 SKPD
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Mening katnya penyele saian tindak lanjut hasil pemeriksaa n internal dan ekster nal,	Prosentase rekomenda si hasil pemeriksaa n internal yang telah selesai ditindak lan juti.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas an Internal .	Melaku kan monito ring terhadap TLHP APIP	Jlh LHM TLHP APIP sesuai standard an tepat waktu.	18 LHM	18 LHM	16 LHM	20 LHM	20 LHM
							Melaku kan Rapat Pemuta khiran Data/ Gelar Pengawas an Hasil Pemerik saan APIP	Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang dilaksanakan/dii kuti	3 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	3 Keg.
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian		Prosentase rekomenda si hasil pemeriksaa n eksternal	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Melaku kan monito ring terhadap	Jlh LHM TLHP BPK RI sesuai standard an tepat waktu	2 LHM	2 LHM	2 LHM	2 LHM	2 LHM

			Pelaksanaan Kebijakan KDH.		yang telah selesai ditindaklanjuti	an Eksternal .	TLHP BPK						
							Mengikuti Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI.	Jumlah Rapat Rekonsiliasi TLHP BPK RI yang diikuti	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat.	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Prosentase Terpenuhinya penugasan Tim kasus pengaduan masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah.	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Prosentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standar dan tepat waktu.	100 %	100%	100%	100%	100%
							Menyiapkan bahan Rapat Sinergitas Penanganan Dumas	Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindaklanjuti.	-	-	-	-	100%

Matrik IV.4.1  
Matrik Daftar Indikator Kinerja Kegiatan  
Tahun 2013 – 2017.

Nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

VISI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

MISI 2 : MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA/IKU)	SASARAN PROGRAM	IK PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IK KEGIATAN	TARGET TAHUN				
									2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)			(8)	(9)			(4)	(5)			
2. Mewujudkan Aparat Inspektorat Kab. Barito Kuala yang profesional.			Meningkatnya aparat yang kompeten	Proentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan /Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Endidikan dan Pelatihan Formal	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	12 OK	10 OK	9 OK	15 OK	10 OK
								Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri.	-	4 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	4 Keg.



				Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan JF		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional	5 OK	7 OK	8 OK	2 OK	7 OK
--	--	--	--	---	--	---------------------------------	---	---	------	------	------	------	------

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN**

#### **DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pengawasan. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan serta sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam rangka mensukseskan Misi Kabupaten Barito Kuala khususnya misi ke tiga.

#### **A. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.**

##### **1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,**

dengan Sasaran Program :

##### **a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.**

Dengan Kegiatan “Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala” dengan sasaran kegiatan :

- a) Melakukan Reviu RKA SKPD;
- b) Melakukan Reviu LKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.;
- c) Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD;

**b. Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Perundang-undangan.**

Dengan Kegiatan "*Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala*" dengan sasaran kegiatan

:

- a) Melakukan Audit Operasional.
- b) Melakukan Audit Manajemen Aset;
- c) Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran
- d) Melakukan Probity Audit.;

**c. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Keyuangan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**

Dengan Kegiatan "*Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala*" dengan sasaran kegiatan

- a) Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab;
- b) Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD.

**d. Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.**

Dengan Kegiatan "*Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah*" dengan sasaran kegiatan :

- a) Melakukan Audit Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.
- b) Menyiapkan bahan rapat Sinergitas Penanganan Pengaduan Masyarakat.

**e. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.**

Dengan Kegiatan "*Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah*" dengan sasaran kegiatan :

- a) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal, dengan sasaran kegiatan :
  - 1) Melakukan Monitoring TLHP APIP;

2) Melaksanakan Rapat/Gelar Pengawasan/Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan APIP.

b) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal, dengan sasaran kegiatan :

1) Melakukan Monitoring TLHP BPK-RI;

2) Mengikuti Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI.

## **2. Program Penataan Peraturan Per Undang-Undangan;**

**Dengan sasaran Program Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD.**

Dengan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan, dengan sasaran kegiatan :

a. Melakukan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

b. Melakukan Pembentukan Satgas SPIP SKPD.

## **3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan/ Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;**

**Dengan sasaran Program Meningkatnya Aparat Yang Kompeten.**

Dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal , dengan sasaran kegiatan :

a. Mengikut sertakan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam Mengikuti Diklat Substantif;

b. Mengikut sertakan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam Mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional.

c. Melaksanakan Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS).

## **B. Program dan Kegiatan Penunjang Tercapainya Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.**

Untuk tercapainya Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala selain Program dan Kegiatan Utama juga terdapat Program dan Kegiatan Penunjang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 1.5. Penyediaan alat tulis kantor
  - 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
  - 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 1.11. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi /teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
  - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
  - 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
  - 1.1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program penyimpan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah dengan kegiatan :
  - 1.1. Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah

**C. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif lima tahun kedepan disajikan dalam tabel berikut :

nama SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA  
 ISI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.  
 ISI 1 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL

...iah)

[illegible]

			Evaluasi SAKIP SKPD		0	0	46 LHE	160	46 LHE	160	46 LHE	170	47 LHE	170	185 LHE	660	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
			Rviu RKA SKPD		0	0	0	0	46 LHR	0	46 LHR	60	47 LHR	70	139 LHR	130	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
Peningkatan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.																	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala :																	
			Reviu LK Pemkab. Batola.		0	0	1 LHR	0	1 LHR	0	1 LHR	0	1 LHR	0	4 LHR	0	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
Meningkatkan Kepatuhan KPD terhadap Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala :																	
			Melakukan Audit Operasional		85 LHP	840	85 LHP	840	85 LHP	840	87 LHP	840	105 LHP	840	447 LHP	4.200	Kab. Barito Kuala	
			Melakukan Audit Manajemen Aset		0	0	0	0	45 LHA	160	0	0	47	160	91 LHP	320	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
			Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran		0	0	46 LHR	75	46 LHR	75	46 LHR	80	47 LHR	80	18 LHR	310	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
			Melakukan Probitas Audit		0	0		0		0	0	0	11 LHP	70	11 LHP	70	Inspektorat	Kab. Barito Kuala



Persentase laporan keuangan KPD yang telah direvisi dan ditindaklanjuti																		
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala :																
			Reviu LK SKPD		46 LHR	300	46 LHR	300	46 LHR	300	46 LHR	325	47 LHR	325	231 LHR	1.550	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan Masyarakat.																		
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
		Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah :																
			Pemeriksaan Khusus/Kasus atas Pengaduan Masyarakat.	3	2 Kasus	50.000	2 Kasus	60.000	2 Kasus	70.000	4 Kasus	80.000	4 Kasus	90.000	14 Kasus	350.000	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
			Rapat Koordinasi Tim Sinergitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12 Bulan	690.000	12 Bulan	690.000	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
Persentase KPD yang telah membentuk Satgas SPIP																		
	Penataan Peraturan Per Undang-Undangan																	
		Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan :																
			Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.	0 SKPD	0 SKPD	0,00	0 SKPD	0,00	15 SKPD	8.510	15 SKPD	8.510	17 SKPD	9.000	47	25.300	Inspektorat	Kab. Barito Kuala

			Pembentuk kan Satgas SPIP SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0,00	0 SKPD	0,00	15 SKPD	0,00	15 SKPD	0,00	17 SKPD	0,00	47	0,00	Inspektorat	Kab. Barito Kuala.
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH.																		
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal :															
			Monitoring TLHP APIP.	87 LHM	18 LHM	210.000	18 LHM	220.000	16 LHM	230.000	20 LHM	240.000	20 LHM	250.000	92 LHM	1.150.000	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
			Rapat Gelar Pengawasan / Pemuta khiran Data Hasil Pemeriksaan APIP.	3 Kali	3 Kali	90.000	3 Kali	100.000	3 Kali	110.000	3 Kali	120.000	3 Kali	130.000	15 Kali	550.000	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH.																		
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal :															
			Monitoring TLHP BPK-RI	2 Kali	2 Kali	3.600	2 Kali	3.600	2 Kali	3.600	2 Kali	3.600	2 Kali	3.600	10 Kali	18.000	Inspektorat	Kab. Barito Kuala
			Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI.	Kali	2 Kali	8.829	2 Kali	8.829	2 kali	8.829	2 Kali	8.829	2 Kali	8.829	10 Kali	44.145	Inspektorat	Banjarbaru

Matrik V.2  
Matrik Daftar Indikator Program dan Kegiatan  
Tahun 2013 – 2017.

ma SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA  
I : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA  
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.  
SI 2 : MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.

IKU INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA (3)	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (9)	Lokasi
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Peningkatan Prestasi Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat diklat substansif.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan/Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																
		Pendidikan dan Pelatihan Formal :															
		Mengikutsertakan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	10 OK	12 OK 282.000	10 OK 235.000	9 OK 211.500	15 OK 352.500	10 OK 235.000	56 OK 1.316.000	Inspektorat	Luar Provinsi						
		Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri	0 Kali	0 Kali 0,00	4 Kali 5.000	3 4.000	3 4.000	2 2.000	12 15.000	Inspektorat	Kab. Barito Kuala						

			Bidang Pengawasan																
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan/Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																			
		Pendidikan dan Pelatihan Formal :																	
		Mengikutsertakan Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional.			7 OK	5	117.500	7	164.500	8	188.000	2	47.000	7	164.500	29	681.500	Inspektorat	Luar Provinsi

Matrik V.3

## Matrik Daftar Indikator Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2013 S/D 2017

Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab (9)	Lokasi
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Program Pelayanan Administrasi Pekantoran	Tercapainya optimalisasi pelayanan publik														➤	➤
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terse diannya mate rai dan terbaya rnya upah harian lepas jasa surat menyu rat	239	366 Lbr	10.165	633 lbr	10.978	450 lbr	17.790	450 lbr	17.790	450 lbr	17.990	2.349 lbr	74.513	Inspektorat	Batola
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terba yarnya reke ning telpon, air dan listrik	12	12 bln	17.086	12 bln	16.426	12 bln	26.604	12 bln	39.804	12 bln	43.000	60 ln	142.922	Inspektorat	Batola
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terba yarnya upah harian lepas jasa penja ga malam	1	0	-	0	-	365 oh	11.485	365 oh	11.485	365 oh	11.485	1.095 oh	34.455	Inspektorat	Batola

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terbayarnya STNK mobil 2 unit dan kendaraan roda 2=12 unit	11	12 unit	3.128	12 unit	2.031	19 unit	3.980	20 unit	5.475	25 unit	5.475	88 unit	20.089	Inspektorat	Batola
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya upah harian lepas jasa kebersihan kantor	1	1 orang	9.487	1 orang	10.351	1 orang	13.775	1 orang	13.803	1 orang	13.083	5 orang	61.219	Inspektorat	Batola
Penyediaan alat tulis kantor	Terse dianya alat tulis kantor (ATK)	47	47 jenis	34.295	47 jenis	37.185	47 jenis	17.740	45 jenis	17.740	45 jenis	17.740	231 jenis	124.700	Inspektorat	Batola
Penyediaan barang certakan dan penggandaan	Terse dianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	836	13 jenis	29.366	13 jenis	23.238	13 jenis	16.229	13 jenis	16.109	13 jenis	16.109	85 jenis	101.051	Inspektorat	Batola
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terse dianya alat listrik dan elektronik	6	7 jenis	1.291	7 jenis	2.518	7 jenis	1.260	7 jenis	1.402	7 jenis	1.402	35 jenis	7.873	Inspektorat	Batola

Penyediaan peralatan dan perelegkapan kantor	Terse dianya perla tan dan per leng kan kantor		0	-	12 jenis	21.650	7 jenis	1.970	10 jenis	3.190	10 jenis	3.190	39 jenis	30.000	Inspektorat	Batola
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terba yarnya langgan an koran/ maja lah	4	4 jenis	3.540	4 jenis	3.600	6 jenis	4.100	6 jenis	4.340	6 jenis	4.340	26 jenis	19.920	Inspektorat	Batpla
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedi anya makan an dan minum harian, rapat dan tamu	5165	9145 porsi	31.787	9085 porsi	31.215	9320 porsi	34.240	9320 porsi	41.995	9320 porsi	41.995	46.190 porsi	181.232	Inspektorat	Batola
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlak sannya rapat-rapat kordina si dan konsul tasi ke luar daerah	80	70 ok	127.638	45 ok	111.346	20 ok	51.528	20 ok	121.911	20 ok	121.911	175 ok	534.454	Inspektorat	Batola
Penyediaan jasa tenaga pendukung adminitrasi /teknis perkantoran	Terba yarnya upah harian lepas	-	365 ok	5.840	365 ok	5.840	0	0	0	0	0	0	730 ok	11.680	Inspektorat	Batola

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			-		-										
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	-	0	-	5 unit	99.450	0	0	5 unit	138.500	0	0	10 unit	237.950	Inspektorat	Batola
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terse dianya perlengkapan gedung kantor	-	0	-	2 jenis	8.900	2 jenis	2.525	10 jenis	66.131	4jenis	5.000	18 jenis	82.556	Inspektorat	Batola
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terse dianya peralatan gedung kantor	1	14 buah	61.609	10 buah	47.778	6 buah	15.033	11 buah	55.932	11 buah	15.000	52 buah	195.352	Inspektorat	Batola
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin /berkala	30	17 jenis	11.966	15 jenis	47.778	16 jenis	37.592	15 jenis	55.932	15 jenis	15.000	78 jenis	168.268	Inspektorat	Batola
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya mobil 2 unit dan kendaraan roda 2=12 unit secara	10	12 unit	34.275	12 unit	35.128	19 unit	43.922	20 unit	56.040	25 unit	56.040	88 unit	225.405	Inspektorat	Batola



		rutin/ berkala															
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlak sanany a service AC, kompu ter, printer dan telpon	12	5 jenis	11.900	5 jenis	20.990	5 jenis	20.990	5 jenis	22.110	5 jenis	24.000	25 jenis	99.990	Inspektorat	Batola
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Terca painya pening katan SDM yang handal dan kompe titif															
	Pendidikan dan pelatihan formal	Diikuti nya pendidi kan dan pelatih an formal	8	14 ok	106.650	4 ok	36.610	4 ok	33.212	4 ok	49.470	4 ok	49.470	30 ok	275.412	Inspektorat	Batola
	Program Peningkatan Pengembangan Sisiem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Mening katnya Pe ngem bangan Sistem Pelapor an Capai an Kinerja dan Keuang an															

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD, Laporan capaian kinerja & keuangan, LAKIP, Renja, RKA, DPA, dan LP2P	9	33 dok	11.628	21 dok	13.156	32 dok	640	41 dok	640	41 dok	640	168 dok	26.704	Inspektorat	Batola	
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi anggaran	0	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	10	1 dok	10	1 dok	10	3 dok	10	Inspektorat	Batola	
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	0	0 dok	-	0 dok	-	3 dok	1000	3 dok	1000	3 dok	1000	9 dok	3000	Inspektorat	Batola	
Program Penyimpanan Potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi																

Penyelenggaraan pameran dan investasi/ promosi daerah	Diikuti nya Pameran pembangunan dalam rangka HUT Kab. Batola	1	1 kali	10.000	1 kali	10.000	1 kali	10.000	1 kali	10.000	1 kali	10.000	5 kali	50.000	Inspektorat	Batola	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah																
Sosislaisasi Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	1 kali	26.350	0 kali	-	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	26.350	Inspektorat	Batola	
JUMLAH			100 %	548.001	100%	596.290	100 %	365.625	100 %	750.809	100 %	464.400	100 %	2.735.125			

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD**

#### **YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mendukung misi ke tiga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “ **Rasa Aman Dan Adil Yang Dipenuhi Dengan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Dan Penciptaan Tata Kehidupan Sosial Yang Baik**” dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan menciptakan tata kehidupan sosial yang baik dengan sasaran RPJM : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil. Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM ditampilkan pada tabel berikut:

**Matrik VI.1**  
**MATRIK PERENCAAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2013 – 2017.**

KABUPATEN			INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA							
VISI : “BARITO KUALA SAMA RASA” BARITO KUALA SATU KATA UNTUK MAJU, MANDIRI, MEWUJUDKAN RAKYAT BERDAYA SAING YANG SEJAHTERA.			VISI : TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUNJU TATA KELOLA KEPEMRINTAHAN YANG BAIK							
MISI (KE-5): MEWIJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KEPEMRINTAHAN DAN SISTEM KEHIDUPAN SOSIAL YANG BAIK.			MISI : 1. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN INTERNAL 2. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP).							
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS RPJMD	IKU RPJMD REVIEW	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Sistem Kehidupan Sosial Yang Baik.	Sasaran 5 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Yang Berindikasikan : Semakin Dapat Dipenuhi nya Pelayanan	Nilai SAKIP (Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi).	Mewujudkan Pemerintahan yang semakin baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	3. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	C	B	Memastikan dokumen perencanaan Pemkab. baik.	Peningkatan kualitas AKIP melalui reviu LKIP Pemerintah Kabupaten.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
					2. Persentasi Jumlah SKPD nilai minimal CC	0% (dari 46 SKPD)	50% (dari 47 SKPD)	Memastikan dokumen perencanaan SKPD baik.	Peningkatan kualitas AKIP melalui Pembinaan dan evaluasi LKIP SKPD.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

	Prima Kepada Masyarakat, Yang Mendukung Kepuasan, Rasa Aman dan Adil.	Opini BPK (Pengawasan, Efektifitas dan Efisiensi).	Mewujudkan Pemerintahan yang semakin baik	Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	WDP	WTP	Reviu LK Pemkab	Pemantapan reviu LK Pemkab.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
					Persentase Jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan Material.	60,87% (dari 46 SKPD)	95% (dari 47 SKPD)	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan.	2. Penyusunan dan Penyempurnaan norma, standard dan prosedur pemeriksaan 3. Peningkatan kompetensi APIP.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti..	0%	100% (dari 47 SKPD)	Reviu LK SKPD.	Pemantapan reviu LK SKPD.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
				Tebentuknya SPIP di SKPD	1. Persentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP.	0% (dari 46 SKPD)	100% (dari 47 SKPD)	Sosialisasi SPIP.	Pembentukan SPIP di SKPD.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
				Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal,	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah selesai ditindak lanjuti.	70% (dari jumlah rekomendasi APIP)	80% (dari jumlah rekomendasi)	Peningkatan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Intensifikasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

								APIP.		
					2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah selesai ditindaklan juti	60% (dari jumlah rekomenda si BPK-RI).	80% (dari jumlah rekomen dasi BPK-RI	Peningkat an Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan	Intensifikasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakana n KDH.
				Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Terpenuhinya penugasan Tim kasus pengaduan masyarakat	100% (dari jumlah pengadua n yang memenuhi 5W1H)	100% (dari jumlah pengadu an yang memenu hi 5W1H)	Membuka saluran atas pengaduan masyarakat	Menindak lanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakana n KDH.
			2. Mewu judkan Aparat Inspekto rat Kab. Barito Kuala yang profesio nal.	1. Meningkatkan aparat yang kompeten	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif.	18 %	50 %	Peningkat an Kompetensi APIP.	Mengukutser takan Diklat Substantif bidang pengawasan.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan/Peni ngkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
					Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan JF	30 %	60 %		Mengukutser takan Diklat Sertifikasi JF.	

**Matrik VI.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
	(Sasaran 5). Terwujudnya Penyelenggaraan Kepemrintahan dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik yang diidikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Penunjang	Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola oleh Instansi Berwenang (Itprov/BPKP/Men PAN-RB)	Untuk memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelentasi SAKIP dengan rumusan : AA : >90 -100 A : >80 - 90 BB : >70 – 80 B : >60 - 70 CC : >50 - 60 C : >30 - 50 D : 00 - 30
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Penunjang	Inspektorat	Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Pemkab. Batola oleh BPK RI	Untuk memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten : 1. WTP 2. WDP 3. TW 4. Disclaimer.



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
	kepada masyarakat yang mendukung kepuasan rasa aman dan adil.							
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat.	Penunjang	Inspektorat	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.	Untuk memenuhi Pasal 29 PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Lampiran tanggal 31 Maret 2008 Permen PAN Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP (Audit dengan tujuan tertentu/Investigativ.	Jumlah Realisasi Penanganan Kasus ----- X 100 Jumlah Aduan Yang Masuk

**Matrik VI.3**

**INDIKATOR KINERJA PEJABAT ESELON III**

**SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

SASARAN RENSTRA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala.	Persentase Jumlah SKPD dengan Nilai Minimal CC.	%	Untuk memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN.	Jumlah SKPD Nilai SAKIP dari CC Keatas ----- X 100 Jumlah SKPD Lingkup Pemkab. Batola	Irban I, II, III dan IV.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dari Inspektorat Kab. Batola.
.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.	Persentase Jumlah SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Material.	%	Untuk memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Jumlah SKPD Yang Menjadi Obyek Pemeriksaan APFP Tidak Terdapat Temuan Material ----- X 100 Jumlah SKPD Yang Menjadi Objek Pemeriksaan APFP	1. BPK RI 2. Itprov Kal Sel 3. BPKP 4. Itkab. Batola	Laporan Hasil Pemeriksaan APFP di Pemkab. Barito Kuala.
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti.	%	Untuk memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Direviu ----- X 100 Jumlah SKPD Yang Menindak Lanjuti Hasil Reviu	Irban I, II, III dan IV	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SKPD
	Terbentuknya Satgas SPIP di	Persentase SKPD yang Telah	%	Untuk memenuhi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Jumlah SKPD Yang Telah Membentuk Satgas SPIP ----- X 100	SKPD	SKPD Lingkup Pemkab. Barito

	SKPD	Membentuk Satgas SPIP.			Jumlah SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala		Kuala.
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	%	PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permen PAN RB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Yang Selesai Ditindak Lanjuti ----- X 100 Jumlah Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP	Sekretariat	Laporan Hasil Monitoring TLPH APIP.  Laporan Hasil Rapat Pemutakhiran Data.
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permen PAN RB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Selesai Ditindak Lanjuti ----- X 100 Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Sekretariat	Laporan Hasil Monitoring TLHP BPB-RI.  Laporan Hasil Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI
	Meningkatnya Aparat yang kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang berertifikat Diklat Substantif.	%	Untuk memenuhi Permen PAN RB Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP dan Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP.	Jumlah PFT Pengawasan di Inspektorat Kab. Batola Yang Memiliki Sertifikat Diklat Substantif ----- X 100 Jumlah PFT Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	Sekretariat	Sertifikat Mengikuti Diklat.
		Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus	%	Untuk memenuhi Permen PAN RB Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP dan Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP.	Jumlah PFT Pengawasan di Inspektorat Kab. Barito Kuala Yang telah Mengikuti dan Lulus Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional ----- X 100	Sekretariat	Sertifikat Lulus Sertifikasi Pembentukan/Penjenjangan JF.

		Diklat Penjenjangan JF.			Jumlah PFT Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang telah memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional		
3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	Persentase Teerpenuhnya penugasan Tim kasus pengaduan masyarakat	%	Untuk memenuhi Pasal 29 PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Lampiran tanggal 31 Maret 2008 Permen PAN Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP (Audit dengan tujuan tertentu/Investigativ.	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Penanganan Kasus}}{\text{Jumlah Aduan Yang Masuk}} \times 100$	Urban I, II, III dan IV	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

**Matrik VI.4**  
**INDIKATOR KINERJA PEJABAT ESELON IV**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

SASARAN RENSTRA	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Kabupaten Barito Kuala.	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD Sesuai standar dan tepat waktu.	Dok	Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Kemendagri dan Pemda.	Jumlah LHR RKA SKPD yang terbit ----- X 100 Jumlah Target dalam PKPT.	Irbab I,II,III dan IV	LHR RKA SKPD
		Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Standar dan tepat waktu.	Dok	Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi SAKIP.	Jumlah LHE SAKIP Pemkab. Batola ----- X 100 Jumlah Target dalam PKPT	Irbab I,II,III dan IV	LHE SAKIP Pemkab Batola
		Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD.	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standar dan tepat waktu	Dok	Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi SAKIP.	Jumlah LHE SAKIP SKPD yang terbit ----- X 100 Jumlah Target dalam PKPT	Irbab I,II,III dan IV	LHE SAKIP SKPD
	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional Sesuai standar dan tepat waktu	Dok	Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah LHA Operasional yang terbit ----- X 100 Jumlah Target dalam PKPT	Irbab I,II,III dan IV	LHA Operasional

		Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standar dan tepat waktu	Dok	Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi LHA Manajemen Aset yang terbit  ----- X 100  Jumlah Target dalam PKPT	Irban I,II,III dan IV	LHA Manajemen Aset
		Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai standar dan tepat waktu	Dok	Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun yang terbit  ----- X 100  Jumlah Target dalam PKPT	Irban I,II,III dan IV	LHA Kas Akhir Tahun
		Melakukan Probit Audit	Jumlah Laporan Probit Audit sesuai standar dan tepat waktu.	Dok	Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah dan telah diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011.	Jumlah Realisasi Laporan Probit Audit  ----- X 100  Jumlah Target dalam PKPT	Irban I,II,III dan IV	Laporan Probit Audit
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemkab. Barito Kuala	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai standar dan tepat waktu	Dok	Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi LHR yang terbit  ----- X 100  Jumlah Target dalam PKPT	Irban I,II,III dan IV	LHR LK Pemkab. Batola
		Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD	Jumlah LHR LK SKPD sesuai standar dan tepat waktu.	Dok	Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi LHR yang terbit  ----- X 100  Jumlah Target dalam PKPT	Irban I,II,III dan IV	LHR LK SKPD

	Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD	Melakukan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi	Dok	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Jumlah Pelaksanaan Realisasi Sosialisasi ----- X 100 Jumlah target dalam Renstra	Irban I,II,III dan IV	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi
		Melakukan Pembentuk kan Satgas SPIP SKPD	Jumlah SKPD yang terbentuk Satgas SPIP SKPD	Dok	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Jumlah SKPD Yang telah membentuk Satgas SPIP SKPD Tahun Berjalan ----- X 100 Jumlah SKPD	Irban I,II,III dan IV	SK Kepala SKPD Pembentukan Satgas SPIP SKPD
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.	Melakukan monitoring terhadap TLHP APIP	Persentase TLHP APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bartito Kuala (Pasal 7 ayat 1 dan 2)	Jumlah LHM TLHP APIP yang Terbit ----- X 100 Jumlah LHM Yang Ditetapkan dalam PKPT	Kasub bag Evlap	Laporan Hasil Monitoring TLPH APIP.  Laporan Hasil Rapat Pemutakhiran Data.
		Melakukan Rapat Pemutakhiran Data/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang dilaksanakan/diikuti	Kegiatan	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bartito Kuala (Pasal 7 ayat 1 dan 2)	Jumlah kegiatan rapat pemutakhiran data/gelar pengawasan hasil pengawasan APIP -----X 100 Target kegiatan rapat pemutakhiran data/ gelar pengawasan dalam renstra	Kasub bag Evlap	Laporan Hasil Rapat Pemutakhiran Data/Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan APIP
		Melakukan monitoring terhadap TLHP BPK	Persentase TLHP BPK-RI yang telah selesai ditindaklanjuti	%	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bartito Kuala (Pasal 7 ayat 1 dan 2)	Jumlah LHM TLHP BPK RI yang Terbit ----- X 100 Jumlah LHM Yang Ditetapkan dalam PKPT	Kasub bag Evlap	Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rekomendasi hasil pengawasan BPK

		Mengikuti Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP BPK-RI.	Jumlah Rapat Rekonsiliasi yang diikuti.	kegiatan	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bartito Kuala (Pasal 7 ayat 1 dan 2)	Jumlah kegiatan rapat rekonsiliasi yang dilaksanakan ----- X 100 Target kegiatan Rapat Rekonsiliasi Yang Ditetapkan dalam Renstra	Kasub bag Evlap	Laporan Rapat Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
	Meningkatnya Aparat yang kompeten.	Mengikutserta kan PFT Pengawas an Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawas an	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	OK	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Pasal 5 ayat 1 dan 2)	Jumlah PFT yang Mengikuti Diklat Substantif -----x 100 Jumlah target PFT yang akan Mengikuti Diklat Substantif Bidang Pengawasan yang ditetapkan dalam Renstra.	Kasubbag Umpeg	Sertifikat
		Mengikutserta kan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengfikuti Diklat Sertifikasi Penjenja ngan JF.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional	OK	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Pasal 5 ayat 1 dan 2)	Jumlah PFT yang mengikuti dan lulus Sertifikasi Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional -----x 100 Jumlah target PFT yang mengikuti dan lulus Sertifikasi Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional yang ditetapkan dalam Renstra	Kasubbag Umpeg	Sertifikat
		Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri.	Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri yang Dilaksanakan	Kegiatan	Perbub NOMOR 23 TAHUN 2011 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Pasal 5 ayat 1 dan 2)	Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah target pelatihan di kantor sendiri (PKS) yang ditetapkan dalam Renstra	Kasubbag Umpeg	Laporan kegiatan PKS
Meningkatnya Penyelesaian	Meningkatnya Penanganan	Melakukan Audit Khusus/	Persentase Penerbitan Laporan	Dok	Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang	Jumlah LHP yang terbit		



Pengaduan Masyarakat	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Kasus pengaduan masyarakat;	Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standar dan tepat waktu.		Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri.	-----x 100 Surat penugasan		
		Menyiapkan bahan Rapat Sinergitas Penanganan Dumas.	Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang Ditindak Lanjuti	Dok	Undang-undang No.23 Tahun 2014 dan PP No.12 Tahun 2017	Jemlah Pemeriksaan Kasus Pelimpahan dari APH -----x 100 Jumlah Pelimpahan Kasus dari APK ke Inspektorat Kab. Barito Kuala		

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 merupakan Implementasi dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013-2017. Fokus dari Renstra diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang ada sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra juga merupakan gambaran peta potensi kekuatan dan permasalahan, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang ingin dicapai.

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebagai garda terdepan pengawasan internal SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menetapkan visi: " Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik ". Dengan visi tersebut diharapkan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selain menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan, Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Kuala juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi para pengelola program dan kegiatan terhadap capaian kinerja.

Marabahan, 1 Juli 2017.

Inspektur

Drs. JOHAN ARIFIN  
Nip. 19581209199103 1 002